

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengembangan

a. Pengertian

Menurut Gay penelitian pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem, agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji teori. Sementara menurut Sujadi Pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, yang bisa dipertanggung jawabkan.²²

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.²³

Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan

²²Risky Abady, 8 *Pengertian Penelitian Dan Pengembangan Menurut Para Ahli*. Dalam www.SatuJam.Com/Penelitian-Dan-Pengembangan/, Diunduh Pada Senin 1 Juni 2020

²³*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 1 Butir 2 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015*. Hal.2

dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak.²⁴

Perencanaan pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan, supaya perencanaan pengembangan pariwisata benar-benar efektif, sehingga keseimbangan pengembangan dapat dicapai dan dipertahankan.²⁵

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.²⁶

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota.²⁷

Pembangunan kepariwisataan meliputi:²⁸

²⁴Etrika Gery Kusuma Wardani, Skripsi: “*Peran Pengembangan Industri Pariwisata Pantai Prigi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek*”...Hal. 21

²⁵*Ibid*, Hal. 22

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 6 Tentang Kepariwisataaan. Hal. 7

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 8 Tentang Kepariwisataaan. Hal. 8.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Kepariwisataaan. Hal. 7-8

- 1) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 2) Destinasi pariwisata adalah suatu tempat yang dikunjungi dengan periode waktu yang cukup signifikan selama perjalanan seseorang jika dibandingkan dengan tempat lainnya yang dilalui selama perjalanan.
- 3) Pemasaran kepariwisataan adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 4) Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

b. Potensi-potensi pembangunan wilayah pesisir

- 1) Sumber daya dapat diperbaharui (*renewable resources*)
 - a) Hutan mangrove

Merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologi sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat penjernihan dan asuhan berbagai biota, penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi penting serta penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan obat-obatan.

b) Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Disamping mempunyai fisik ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, perlindungan fisik, tempat pemijahan, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara.

c) Rumput laut

Tumbuhan yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut. Namun hidup diperairan dangkal dan berpasir atau sering juga dijumpai pada ekosistem terumbu karang. Namun membentuk padang yang luas dan

lebat di dasar laut yang terjangkau cahaya matahari dengan tingkat penyinaran yang memadai untuk pertumbuhan.

d) Sumber daya perikanan

Potensi sumber daya perikanan laut terdiri atas sumber daya perikanan pelagis besar, pelagis kecil, sumber daya perikanan demersal, udang, ikan karang dan cumi-cumi.

2) Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*)

Wilayah pesisir dan lautan memiliki juga sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*) yang meliputi seluruh mineral dan geologi, yaitu seperti minyak, gas, batu bara, emas, timah, nikel, bauksit, biji besi, cromit, kapur, kaolin dan tanah liat.²⁹

3) Jasa-jasa lingkungan (*environmental services*)

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki berbagai macam jasa-jasa lingkungan, dimana jasa-jasa ini meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologi lainnya.

²⁹Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) Hal. 119-120

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan tersebut antara lain arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitasi, angin dan pemanfaatan perbedaan suhu laut di lapisan permukaan dengan lapisan dalam perairan.³⁰

c. Faktor-faktor pembangunan³¹

- 1) *Cost advantages* adalah keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Didalamnya bergabung berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi.
- 2) *Differentiation*, membedakan destinasi dan produk wisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenities yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih rendah.
- 3) *Business linkages*, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu proses integratif dalam membangun keunggulan kompetitif kepariwisataan. Hubungan

³⁰*Ibid*, Hal. 121

³¹Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal. 80-82

yang dibangun bersifat vertikal dan horizontal serta saling terintegrasi satu sama lainnya.

- 4) *Services*, pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (*entry point*), pada saat berada di destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti administrator bandara dan pelabuhan, seyogyanya mampu memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan.
- 5) *Infrastructures*, kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beroperasi dengan baik juga merupakan faktor penting pembangunan keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata.
- 6) *Technologi*, penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran destinasi pariwisata.
- 7) *Human resources*, kompetensi sumber daya manusia pelayanan dan pembinaan kepariwisataan menjadi kunci penting pelaksanaan berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif.

d. Tujuan pembangunan pariwisata³²

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, dengan banyaknya warga Negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya, akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.
- 2) Penghapusan kemiskinan, kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan diberbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.
- 3) Pembangunan berkesinambungan, kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah tamahan pelayanan, sedikit sekali sumber daya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.
- 4) Pelestarian budaya.
- 5) Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia.
- 6) Peningkatan ekonomi dan industri, pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata.

³²*Ibid*, Hal. 70-71

Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan memberikan kesempatan pada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

- 7) Pengembangan teknologi, dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi, khususnya teknologi industri, akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka.

e. Kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional:³³

- 1) Peningkatan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional.
- 2) Peningkatan pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu didalam maupun luar negeri.
- 3) Peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata.
- 4) Pengembangan *incentive system* usaha dan investasi di bidang pariwisata.
- 5) Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata.
- 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi).
- 7) Sinergi *multi-stakeholder* dalam desain program kepariwisataan.

³³*Ibid*, Hal. 78-79

f. Daerah tujuan wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang didukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

1. Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata.
2. Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata.
3. Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.³⁴

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur:

1. Obyek dan daya tarik wisata, daya tarik wisata juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.³⁵ Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan

³⁴Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah Yogyakarta: Deepublish, 2016*) Hal. 15-16

³⁵Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) Hlm. 19

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.³⁶

2. Prasarana wisata, adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, jembatan, dan lain sebagainya.³⁷
3. Sarana wisata, merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatawan. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan, serta sarana pendukung lainnya.³⁸
4. Infrastruktur, adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah.³⁹
5. Masyarakat.

g. Peningkatan sumber daya manusia bidang kepariwisataan⁴⁰

Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan

³⁶Undang- Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 5 Tentang Kepariwisataaan. Hal. 3

³⁷Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata...*, Hal. 21

³⁸*Ibid*, Hal. 22

³⁹*Ibid*, Hal. 22

⁴⁰Muljadi, *Kepariwisataaan Dan Perjalanan...*, Hal. 76

kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1) Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan iptek modern.

2) Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyelia profesional

Pelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu wisata dan penyelia. Peningkatan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan.

3) Mengembangkan kerjasama internasional

Kerjasama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerjasama antara Negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyelia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

2. Pariwisata

a. Pengertian

Pariwisata pada hakekatnya adalah merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan perseorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan hidup di dalam demensi sosial, budaya, alam dan ilmu.⁴¹

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

b. Jenis-jenis wisata

Setiap wisatawan yang melakukan pariwisata memiliki motif tersendiri terutama dalam hal wisatawan yang ada pada luar daerah. Perbedaan motif-motif tersebut tercermin dengan adanya berbagai jenis pariwisata karena suatu daerah maupun suatu negara pada

⁴¹Jammes J. Spillane, *Komoditi Karet: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*, (Kanisius, 1989), Hal. 72

umumnya dapat menyajikan berbagai atraksi wisata, yang akan berpengaruh pada pengunjung wisata tersebut dan berpengaruh pada fasilitas yang disiapkan dalam pembangunan maupun program promosi dan periklanannya.⁴²

Wisata dapat dikelompokkan menurut objek yang menjadi daya tariknya, yaitu:⁴³

- 1) Wisata budaya, pariwisata yang didasari rasa ingin tahu wisatawan akan budaya lain, kebiasaan yang dilakukan, kepercayaan serta atraksi budaya lain. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni pada masyarakat daerah yang bersangkutan.
- 2) Wisata kesehatan, adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan untuk penyegaran jasmani dan rohani, seperti berkunjung ke tempat pemandian air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara yang menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan.
- 3) Wisata olahraga, pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti bepergian dalam rangka perwakilan negara dalam

⁴²*Ibid*, Hal. 38

⁴³Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : Angkasa, 2006), Hal. 21

pertandingan olahraga antar Negara seperti *Asean Games*, *Olympiade*, *World Cup* dan jenis olahraga lainnya.

- 4) Wisata komersial, pariwisata yang dikomersilkan. Jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- 5) Wisata industri, erat kaitannya dengan pariwisata komersil, hanya saja objek yang dituju berupa lingkungan industri atau daerah perindustrian yang banyak terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
- 6) Wisata politik, pariwisata yang berkenaan dengan kegiatan politik suatu Negara dan peristiwa-peristiwa penting seperti konferensi, musyawarah, kongres, atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini.
- 7) Wisata konvensi, pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat pertemuan-pertemuan atau acara antar negara bagi para peserta konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Jenis-jenis wisata menurut letak:⁴⁴

- 1) Wisata lokal, perjalanan wisata jarak dekat seperti piknik ke luar kota atau tempat wisata yang dapat di tempuh beberapa jam dengan kendaraan mobil.
- 2) Wisata nasional, adalah dinamika perjalanan wisata dalam suatu negara.
- 3) Wisata mancanegara, meliputi wisatawan yang masuk dari luar negeri dan wisatawan yang berwisata ke luar negeri.

c. Obyek wisata

Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Suatu daerah menjadi tujuan wisata yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:

- a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*), maksudnya adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai *entertainment* bila orang berkunjung nantinya.

⁴⁴Prof. Dr. I Gusti bagus Arjana, M.S., *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 96

- b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*), yaitu terdapat sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan cendera mata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga didaerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan *souvenir* maupun kerajinan tangan lainnya dan harus didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti *money changer* dan bank.
- c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*), yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan ditempat itu yang bisa membuat orang yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu obyek wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya.⁴⁵

d. Pengertian Wisatawan

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan atau *tourist*. Batasan terhadap wisatawan juga sangat bervariasi, mulai yang umum sampai dengan yang khusus. Menurut Soekadijo wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya.

⁴⁵Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung : Angkasa, 1996), Hal. 59.

Mereka yang dianggap sebagai wisatawan adalah orang yang melakukan untuk kesenangan, karena alasan kesehatan dan sebagainya: orang yang melakukan perjalanan untuk pertemuan pertemuan atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan (ilmu pengetahuan, administrasi, diplomatik, keagamaan, atlit dan alasan bisnis).⁴⁶

e. Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang didukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan.

Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain.⁴⁷

- a. Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata.
- b. Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata.
- c. Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman dan bersahabat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut

⁴⁶Soekadijo, *Anatomi Pariwisata*, (Jakarta: Gramedia, 2000), Hal. 3.

⁴⁷Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hal. 15

perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi

5 unsur:

- a. Obyek dan daya tarik wisata, daya tarik wisata juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.⁴⁸ Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.⁴⁹
- b. Prasarana wisata, adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, jembatan dan lain sebagainya.⁵⁰
- c. Sarana wisata, merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatawan. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan, serta sarana pendukung lainnya.

⁴⁸Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), Hal. 19

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 5 *Tentang Kepariwisata*, Hal. 3

⁵⁰Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata...*, Hal. 21

- d. Infrastruktur, adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah.⁵¹
- e. Masyarakat.

f. Peran Pariwisata

Pariwisata secara nyata mampu menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian. Destinasi wisata yang tersebar di seluruh penjuru dunia juga memberi andil bagi pertumbuhan sektor lain diluar pariwisata itu sendiri. Pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, sekaligus berperan penting dalam pengembangan aneka kebudayaan, pelestarian lingkungan, pemelihara hubungan sosial, perlindungan warisan budaya, serta penguatan perdamaian dunia.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, besarnya peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi terhadap pentingnya setiap negara memperhatikan ketersediaan lingkungan usaha yang layak, kebijakan yang mendorong pengembangan pariwisata, serta tersedianya inter konektivitas antar wilayah.

Dari sudut pandang keterbukaan sosial, pariwisata berperan meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan pengurangan angka kemiskinan. Selain berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, sektor

⁵¹*Ibid*, Hal. 22

pariwisata juga mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif. Sektor pariwisata juga berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.⁵²

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang akan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih.⁵³

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.⁵⁴

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak kekayaan yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁵⁵

⁵²Setiyo H.N., *Peranan Sektor Pariwisata (Travel dan Tourism) dalam Pembangunan Ekonomi* dalam <https://www.ajarekonomi.com/2018/01/peranan-sektor-pariwisata> traveland.html?m=1 diakses Senin, 1 juni 2020

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 13 Tentang Keuangan Negara.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Butir 13 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah.

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Butir 15 Tentang Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.⁵⁶ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya Daerah dapat mandiri.

Menurut Herlin Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.⁵⁷

Menurut Halim dan Kusufi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah.⁵⁸

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2004 Pasal 3 Butir 1 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah.

⁵⁷Prima Mawitjere "College Journal" Dalam <https://Primalifejournal.Wordpress.Com/?2013/03/26/Pendapatan-As;I-Daera-Pad/> Diunduh Pada Senin, 1 Juni 2020.

⁵⁸Abdul Halim Dan Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*,(Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hal. 101

Daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan asli Daerah bersumber dari.⁵⁹

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.⁶⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

a) Pajak Perhotelan

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losman, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.⁶¹

⁵⁹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pada Bab V (Lima) Nomor 1 (Satu)

⁶⁰Andriansutedy, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hal. 6

⁶¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Etribusi Daerah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hal. 299-303

b) Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.⁶²

c) Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.⁶³

d) Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.⁶⁴

e) Pajak Penerangan Jalan

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

⁶²*Ibid.*, Hal. 327-331

⁶³*Ibid.*, Hal.353-358

⁶⁴*Ibid.*, Hal.381-387

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.⁶⁵

- f) Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.⁶⁷

- g) Pajak Parkir

Yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁶⁸

Sepeti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranana ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi

⁶⁵*Ibid.*, Hlm. 407-410

⁶⁶Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal. 267

⁶⁷Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Etribusi Daerah)*...,Hal. 433-448

⁶⁸*Ibid.*, Hal. 469-473

penduduknya secara perorangan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berlakunya Undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶⁹ Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek Retribusi.⁷⁰ Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*, Hal. 5-6

⁷⁰Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah...*, Hal. 283

⁷¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)...*, Hal. 619

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berhasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Penerimaan jasa giro.
- c) Penerimaan bunga deposito.
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah.⁷²
- f) Komisi.
- g) Potongan.

⁷²Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : Lipi Press, 2005), Hal.

- h) Keuntungan selisi kurs.
 - i) Pendapatan denda pajak dan retribusi.⁷³
- 5) Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.⁷⁴ dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁷⁵

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tentang pengembangan objek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

Penelitian yang dilakukan oleh Prisyilia. R. Rawis, Johhny Posumah, Jericho Denga Pombengi. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif

⁷³Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah Buku Seri Membudayaakan Akuntabilitas Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2010) Hal. 26

⁷⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pememrintah Daerah*

⁷⁵*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Deskriptif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengembangan obyek wisata religius Bukit Kasih Toar Lumimu'ut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan obyek wisata Bukit Kasih berdampak pada peningkatan pendapatan keuangan daerah hal ini disebabkan karena arus kunjungan wisata di Bukit Kasih baik turis lokal maupun turis mancanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat, sekalipun tarif masuk perorangan ke lokasi Bukit Kasih tidak mengalami peningkatan demikian pun untuk pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dilokasi Bukit Kasih retribusi juga mengalami peningkatan.⁷⁶

Penelitian Nining Yuningsih dengan judul *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan di pantai pangandaran dengan tujuan menarik minat wisatawan yang berkunjung, dalam setiap tahunnya pendapatan dari pantai pangandaran selalu mengalami peningkatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.⁷⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah yang berjudul *Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan penerimaan Sektor*

⁷⁶Prisyliya.R.Rawis, JJohnny Posumah, dan Jericho Denga Pombengi, "*Pengembangan Objek Wisata Religius Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*", (Manado: Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), 2015), Hal. 1-10

⁷⁷Nining Yuningsih, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

Pariwisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dengan jenis penelitian asosiatif dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai variabel moderating yang digunakan didalam penelitian ini justru memperlemah hubungannya antara jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁷⁸

Penelitian Tegar Mahardika Dewitasari, Untung Dwi Hananto dan Indarja yang berjudul *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara*, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan strategi dan pengaturan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirasa cukup baik, hal ini dilihat dari aktivitas masyarakat sekitar dan swasta yang memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan kebijakan dibidang pariwisata.⁷⁹

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (Studi Pada Dinas*

⁷⁸ Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah, *Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Sektor Pariwisata sebagai Variabel Moderating pada Dinas Pariwisata Kota Palembang*. Volume 3, Nomor 2, 2018

⁷⁹ Tegar Mahardika Dewitasari dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara*, Diponegoro Law Review. Volume 3, Nomor 2, 2014

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa obyek wisata namun belum adanya aturan hukum atau peraturan daerah (PERDA) yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Mojokerto.⁸⁰

Penelitian Anselmus Simpuru dengan judul penelitian *Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Obyek Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek yang mendukung program pengembangan di Daerah kepulauan Talaud adalah keberagaman atraksi dan potensi wisata, sifat keterbukaan dan keamanan yang relatif terjamin serta minat yang besar dari masyarakat terutama sektor swasta dalam mengembangkan pariwisata di Kepulauan Talaud adalah sumber daya manusia bidang pariwisata yang sangat rendah, anggaran operasional yang masih terbatas, sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, akses transportasi yang masih sulit serta kesadaran masyarakat akan lingkungan yang masih rendah.⁸¹

Penelitian Ahmar, Nurlinda dan Mustafa Muhani dengan judul *Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota*

⁸⁰ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi dkk, *Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No.2 Hlm. 325-331

⁸¹ Anselmus Simpuru, *Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Objek Wisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, (Skripsi Tidak Diterbitkan)

Palopo, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan sektor pariwisata mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya karena disebabkan oleh faktor jumlah wisatawan yang tidak berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien korelasi antara retribusi pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo sebesar 70%. Pengaruh ini menunjukkan bahwa diantara kedua variabel memiliki hubungan kuat dan positif.⁸²

Penelitian yang dilakukan oleh Syamjaya SM. dengan judul penelitian *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, melengkapi sarana serta prasarana penunjang pariwisata. Dalam hal ini obyek wisata yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Kete'Kesu. Sementara obyek wisata yang paling sedikit memberikan kontribusinya adalah Pallawa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata adalah faktor pendukung yaitu

⁸² Ahmar dkk, *Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*, Jurnal Equilibrium Vol. 2 No. 1 2012, Hlm 113-121

partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana serta akses menuju obyek wisata masih kurang.⁸³

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Haris Fauzi, Anis Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul *Pantai Syariah Pulau Santen: Karakteristik Wisatawan dan Faktor yang mempengaruhinya*. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor tata laksana, fasilitas, obyek dan daya tarik wisata alam serta aksesibilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah wisatawan di Pantai Syariah Pulau Santen Banyuwangi. Selain itu, diketahui juga bahwa faktor adanya obyek dan daya tarik wisata alam adalah faktor yang paling kuat yang mempengaruhi wisatawan untuk berwisata di Pantai tersebut.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Prasetia dan Chairul Sa'roni dengan judul *Peranan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotabaru*, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan retribusi disektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan retribusi pariwisata masih relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotabaru yang disebabkan karena meningkatnya

⁸³ Syamjaya SM., *Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara*. Jurnal I La Galigo, Volume 2, No.2, 2019, Hlm. 22-28

⁸⁴ Alex Haris Fauzi dan Anis Hidayati, *Pantai Syariah Pulau Santen: Karakteristik Wisatawan dan Faktr yang Mempengaruhinya*, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 06, No. 02, 2019, hlm. 225-226

juga jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah yang lebih besar. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.⁸⁵

Penelitian Muh Taufiq Jaenuddin dengan judul *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju serta untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁸⁶

Penelitian Ireyni Olivia Eman, Benny Adrian Berthy, Sagay, Sherly Gladys Jocom dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Danau Linouw Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi-strategi pengembangan obyek wisata Danau Linouw untuk peningkatan PAD Kota Tomohon. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁸⁵ Adi Prasetia dan Chairul Sa'roni, *Peranan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kotabaru*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 408-418

⁸⁶ Muh Taufiq Jaenuddin, *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 67-71

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan obyek wisata Danau Linouw dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, terletak pada posisi kuadran 1, hal ini merupakan strategi utama untuk mengembangkan obyek wisata dengan cara mempertahankan kekuatan dan mengoptimalkan peluang sambil memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman yang ada dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.⁸⁷

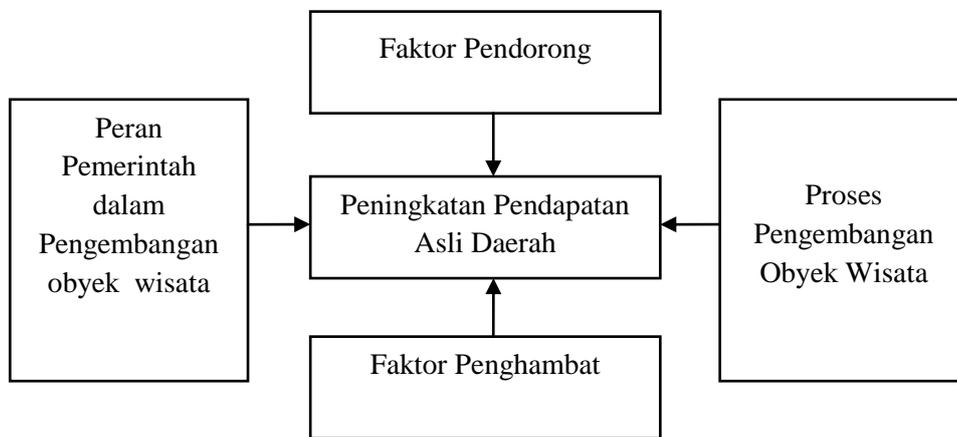
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang faktor yang mendorong dan menghambat industri pariwisata serta mengetahui peran pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini tidak ditekankan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

C. Kerangka Konseptual

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatam asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.

⁸⁷ Ireyné Olivia Eman, dkk, *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Danau Linouw Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon*, Jurnal Agri-Sosioekonomi Vol. 14, No. 1, 2018, Hlm. 371-388

Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Suatu Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Untuk lebih jelas kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.